ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sertipikat Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sehubungan Ditemukan Kekeliruan Pada Sertikpikat Di Jakarta Timur

Fungsi sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Kenyataan dalam masyarakat ternyata masih banyak tanah yang belum bersertipikat dan atau juga masih ditemukan tanah yang telah bersertipikat, tetapi menjadi obyek sengketa pemilikan

Sebagai permasalahan dalam tesis ini: Mengapa dapat terjadi kekeliruan pada pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah Jakarta Timur? Dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pemilik sertipikat terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan ditemukannya kekeliruan setelah terbitnya sertipikat di wilayah Jakarta Timur?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pembahasan permasalahan adalah (1) Pelaksanaan Kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Wilayah Jakarta Timur dimulai dengan melakukan perencanaan kegiatan PTSL yang sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Jakarta Timur dengan melakukan pra inventarisasi calon lokasi dan calon peserta. (2) Upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan bagi pemegang sertipikat, terkait ditemukan adanya kekeliruan yang dapat menimbulkan cacat hukum pada sertipikatnya dikemudian hari. Seperti halnya dengan mengajukan permohonan gugatan baik secara perdata maupun melalui pengadilan tata usaha negara guna melakukan pembatalan sertipikat.

Saran : memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang haknya, untuk mengurangi sengketa yang eskalasinya terus bertambah, Bagi Pemerintah : pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PTSL harus betul betul dilaksanakan secara sistematis, mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia.Bagi Masyarakat: peran aktif dalam memberikan informasi yang akurat tentang kepemilikan maupun tanda batas sangat diperlukan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, PTSL, Kepastian Hukum

ABSTRACT

Legal Protection of Certificate Owners in the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in connection with Errors in Certificates in East Jakarta

The certificate function is a proof of rights that serves as a strong proof of physical data and juridical data contained therein, as long as the physical data and juridical data contained therein, the data contained in the measuring certificate and the land book of the rights concerned. The reality in the community is that there are still many uncertified land and / or land that has been certified, but has become an object of ownership dispute.

As an issue in this thesis: Why can errors occur in the implementation of the Systematic Complete Land Registration (PTSL) program in East Jakarta? And What about legal protection for certificate holders against the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program with the discovery of an error after the issuance of the certificate in the East Jakarta area?

The method used in this research is the empirical juridical approach. A juridical approach is an approach that refers to the applicable laws and regulations.

The results of the discussion of the problems are (1) The implementation of PTSL Activities in the East Jakarta Regional Land Office began by planning systematic PTSL activities by the Head of the East Jakarta Regional Land Office by pre-inventorying prospective locations and potential participants. (2) Government policy in accelerating land registration through PTSL is intended to provide legal certainty of land rights in the form of certificates for the community based on the principle of simple, fast, smooth, fair, equitable and open and accountable so as to improve the welfare and prosperity of the community and the country's economy and reduce and prevent land disputes and conflicts. To overcome these obstacles, the East Jakarta Regional Office of Land Affairs has a very effective solution so that the implementation of PTSL can be carried out in accordance with applicable regulations and can achieve the targets set.

Suggestion: provide legal certainty and protection to right holders, to reduce disputes whose escalation continues to increase, For the Government: the implementation of land registration through PTSL must be carried out in a systematic manner, covering the entire territory of the Republic of Indonesia. For the Community: active role in providing accurate information both ownership and demarcation are needed.

***Keywords**: Legal Protection, PTSL, Legal Certainty*